

NGO

UPT Pemasyarakatan Wilayah Jawa Barat Gelar Ikrar Setia NKRI Untuk 76 Narapidana Teroris

Suhendi - BANTEN.NGO.WEB.ID

Jun 1, 2023 - 14:20



BOGOR – Total 76 Narapidana Teroris; 72 dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur; 2 dari Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur; 2 dari Lapas Kelas IIA Banceuy, nyatakan Ikrar Setia Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan siap kembali berkarya untuk Indonesia, Kamis (01/06).

Bertepatan dengan hari lahir Pancasila, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Barat, R. Andika Dwi Prasetya, menyatakan bahwa kembalinya 76 Narapidana teroris ke Nusantara adalah sebagai bentuk rasa cinta mereka kepada tanah air Indonesia dan mengakui ideologi Pancasila.

“Tanggal 1 Juni ini bukan saja hari yang bersejarah bagi Indonesia, tetapi tanggal 1 Juni ini menjadi momen bersejarah bagi mereka (narapidana teroris) yang menyatakan ikrar setia NKRI di Lapas ini,” tegas Andika.



Selain itu, Andika juga mengungkapkan bahwa kembalinya narapidana teroris ke pangkuan bumi pertiwi ini, bukan sekedar momen ikrar janji belaka, tetapi bahwa mereka memastikan dan berkomitmen untuk siap berkarya demi Indonesia Maju.

“Itulah janji mereka yang harus mereka tunaikan sebagai tekad dan jihadnya untuk Indonesia. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh para pahlawan pendahulu yang memerdekakan bangsa ini,” ungkap Andika.

Ia juga menambahkan bahwa pembinaan narapidana ini juga merupakan bagian dari mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat.

“Pada saatnya mereka akan kembali dan diterima dengan baik oleh masyarakat

dan kami mengajak mereka (narapidana teroris) untuk membangun negeri Indonesia tercinta ini,” ucap Andika.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi, Erwedi Supriyatno, menyampaikan bahwasannya kegiatan pembinaan yang dilaksanakan adalah kolaborasi antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur, Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur, Lapas Narkotika Kelas IIA Banceuy, dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, beserta Stakeholder terkait.



“Kegiatan ini adalah wujud kolaborasi antara Pemasyarakatan dengan BNPT. Saya yakin sinergi yang dibangun membawa perubahan yang lebih baik kedepan antara Pemasyarakatan dan BNPT,” ungkap Erwedi.

Lebih lanjut, Erwedi juga menyampaikan bahwa selama di dalam Lapas, mereka (narapidana teroris) telah diberikan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang terbaik sebagai bekal mereka ketika selesai menjalani pidana.

“Hidroponik dan bioflop juga menjadi salah satu dari beberapa alternatif yang kami kembangkan untuk pembinaan mereka,” tambah Erwedi.

Selain itu, dilaksanakan penandatanganan monumen Ikrar NKRI oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar disaksikan oleh Kepala UPT Pemasyarakatan wilayah Jawa Barat dan Forkopimda Kabupaten Bogor.

Disisi lain, salah satu narapidana teroris Lapas Kelas IIA Gunung Sindur, inisial Z Bin Kholid AB menyatakan bahwa dirinya siap untuk menjadi relawan bagi narapidana lain yang ingin mandiri dalam hidupnya. Selain itu, Ia juga sangat menyesali perbuatannya yang ingin melaksanakan jihad di Suriah.

“Semoga kedepan kita semua yang berada disini diberikan petunjuk oleh Tuhan YME dan senantiasa mendapat rahmat,” ucap ZK.

Rangkaian acara Ikrar Setia NKRI diawali dengan Laporan Kegiatan oleh Kepala Divisi Pemasarakatan Kanwil Kumham Jawa Barat, pelaksanaan Ikrar serta dilanjutkan dengan prosesi penghormatan dan penciuman Bendera Merah Putih. Selanjutnya, Pembacaan Pancasila dan Yel-Yel NKRI HARGA MATI serta penampilan teater Puisi persembahan dari Narapidana Terorisme. Di akhir, dilaksanakan penandatanganan monument NKRI di Blok C Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur.

Turut Hadir, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kepala Densus 88 Anti Teror, Kepala Badan Intelijen Negara, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bogor, Kepala Puskesmas Suliwer, Kepala Puskesmas Gunung Sindur, Ketua Yayasan Niru Nabi, Ketua Yayasan Dompot Dhuafa serta Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jawa Barat (O2).

Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Direktorat Jenderal Pemasarakatan

(Hendi)